



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT KERJA : PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUSTAM
2. Jabatan : AUDITOR MADYA SELAKU KOORDINATOR PENGAWASAN KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR BIDANG PENGAWASAN INSTANSI
PEMERINTAH PUSAT
3. NHK : 30069

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 936.526.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 203 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 559.906.000
2. Tanah Seluas 2800 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 227.520.000
4. Tanah Seluas 550 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 6.100.000
6. Tanah Seluas 2060 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
7. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 159.500.000

1. MOBIL, ISUZU PANTHER MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



3. MOTOR, YAMAHA MIO GT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 51.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 87.500

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 627.679.289

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.775.392.789

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.775.392.789

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.